

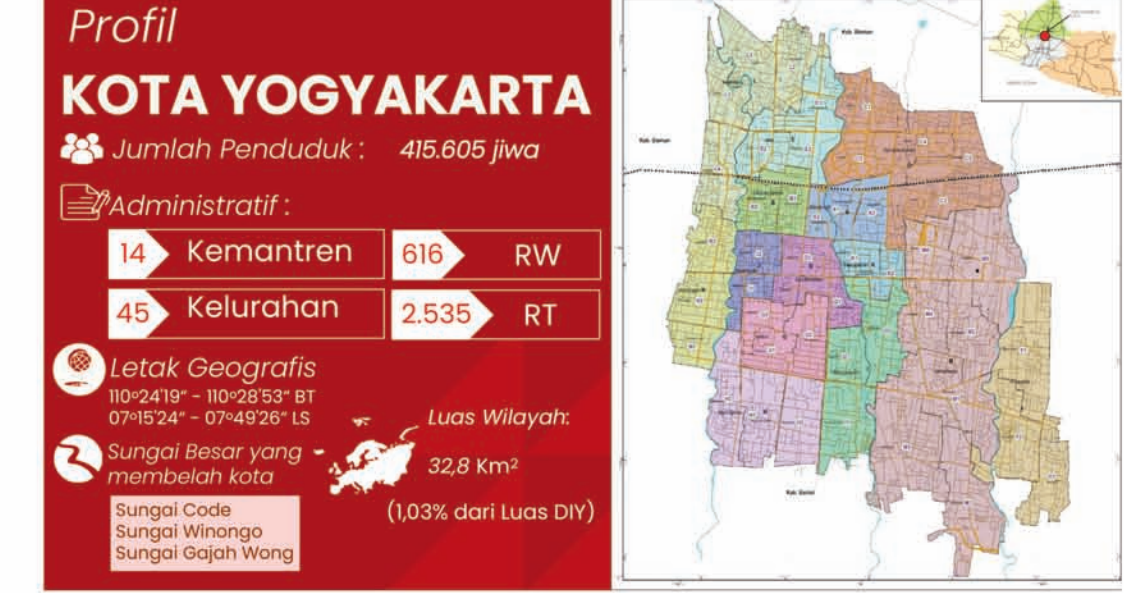


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

Saudara-saudara warga Kota Yogyakarta yang saya cintai dan banggakan, Ahamdullah pui syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024. Penyampaian RLPPD ini merupakan media pertanggungjawaban transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berisi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan kinerja APBD Tahun 2024. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan RLPPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

GAMBARAN UMUM DAERAH

Kota Yogyakarta terletak di antara 110° 24' 19" - 110° 28' 53" Bujur Timur dan antara 07° 49'26" - 07°15'24" Lintang Selatan, secara administratif wilayah Kota Yogyakarta berbatasan dengan:
Sebelah utara : Kabupaten Sleman
Sebelah timur : Kabupaten Sleman dan Bantul
Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman



Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, data diolah

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Visi Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 adalah: "Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan".
Visi ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggaran pemerintahan daerah dan sebagai pemangku kepentingan pembangunan Kota Yogyakarta.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut dan dengan mendasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kendala yang dihadapi, maka dirumuskan misi Kota Yogyakarta sebagai berikut:

- Memperthahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan;
- Memperthahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan;
- Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa;
- Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan;
- Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya;
- Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum;
- Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai;
- Mewujudkan pembangunan sarana dan prasana yang berkualitas;
- Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

prioritas Pembangunan Daerah

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintahan DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPD, serta luas strategis di tahun 2024, maka Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2024 yaitu:

- Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
- Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat;
- Pemertanian Kinerja Aparatur dan Birokrasi yang Profesional Publik.

I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasikan dari berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Kota Yogyakarta menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

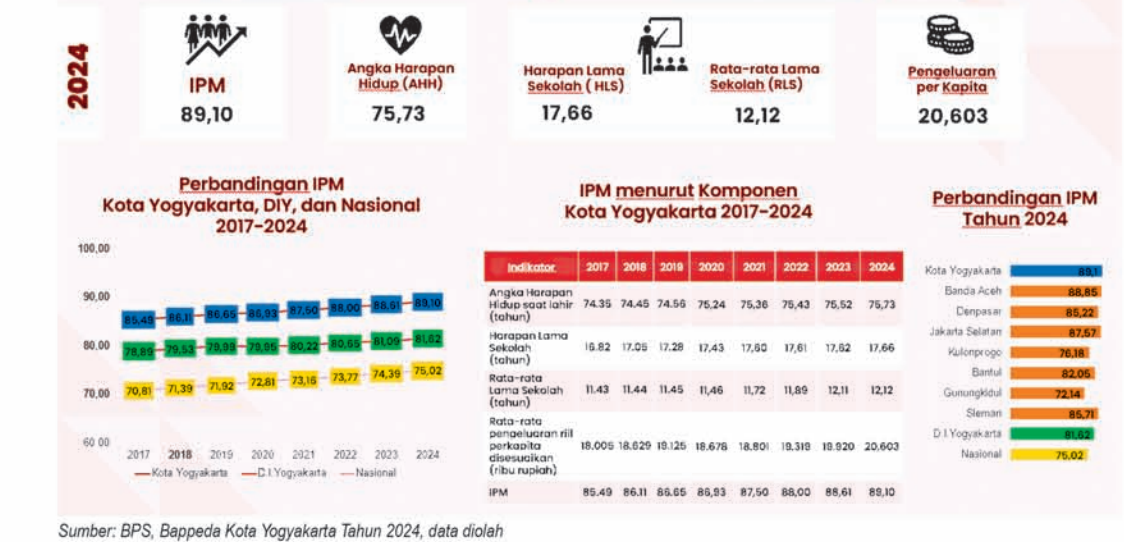
No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Penubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	88,61	89,10	0,55
2	Angka Kemiskinan	6,49%	6,26%	-3,54
3	Angka Pengangguran	6,07	5,80	-4,45
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,08%	5,05%	-0,59
5	Pendapatan per Kapita	122.954,39	131.433,33	6,90
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,454	0,454*	0

Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2024 (*) data realisasi tahun 2023)

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Secara umum, IPM disusun dari empat indikator yang menggambarkan tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Dimensi peluang hidup panjang dan sehat diukur dengan indikator umur harapan hidup penduduk pada saat lahir (life expectancy at age 0 atau e0). Dimensi pengetahuan diukur dengan dua indikator, yakni angka harapan lama sekolah (expected years of schooling) dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja (mean years of schooling). Dimensi standar kehidupan yang layak diukur menggunakan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) di wilayah yang bersangkutan. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Pada tahun 2024, nilai IPM Kota Yogyakarta adalah 89,10. Nilai tersebut menjadi level IPM tertinggi menurut kabupaten/kota tahun 2024.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

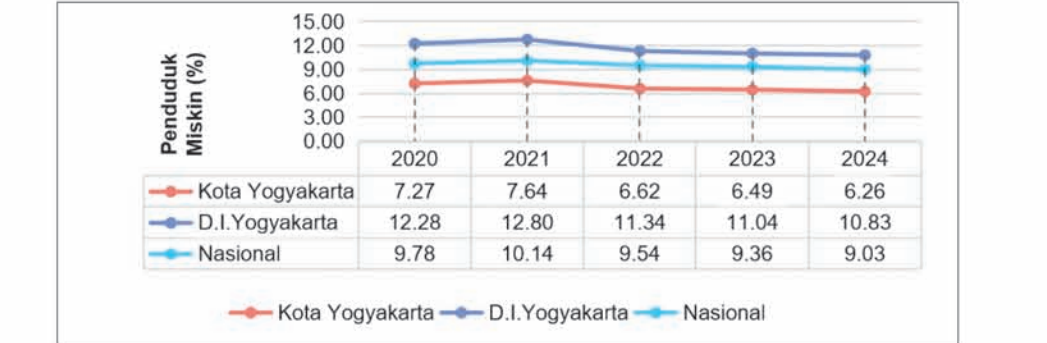
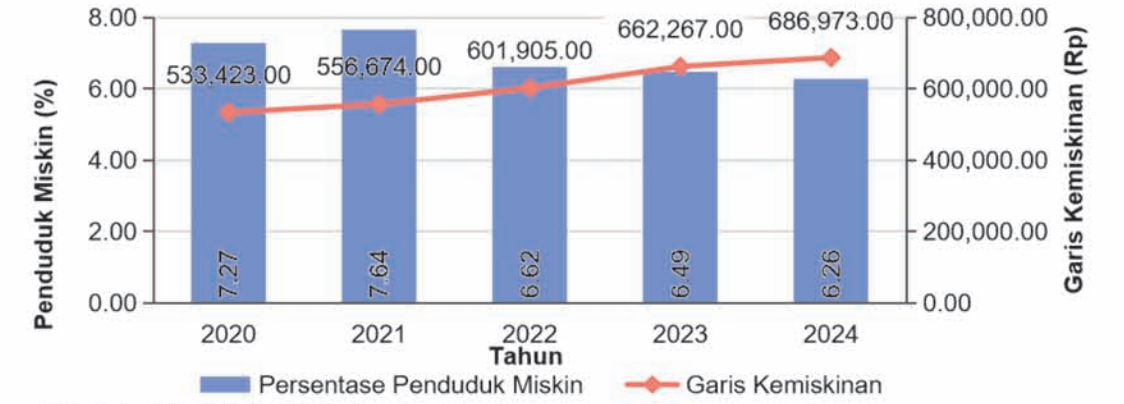


2. Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan BPS ini dihitung menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yaitu dengan memandang ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Penentuan garis kemiskinan ini dilakukan secara periodik berdasarkan survei komoditas pangan dan non pangan. Garis kemiskinan ini kemudian digunakan sebagai basis untuk mensurvei tingkat pengeluaran rumah tangga, dengan hasil memiliki sasaran survei menjadi 2 kelompok yaitu tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan dan tingkat pengeluaran di atas garis kemiskinan. Jumlah kelompok rumah tangga dengan tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan distimasikan proporsinya dan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah tangga dengan tingkat kemiskinan.

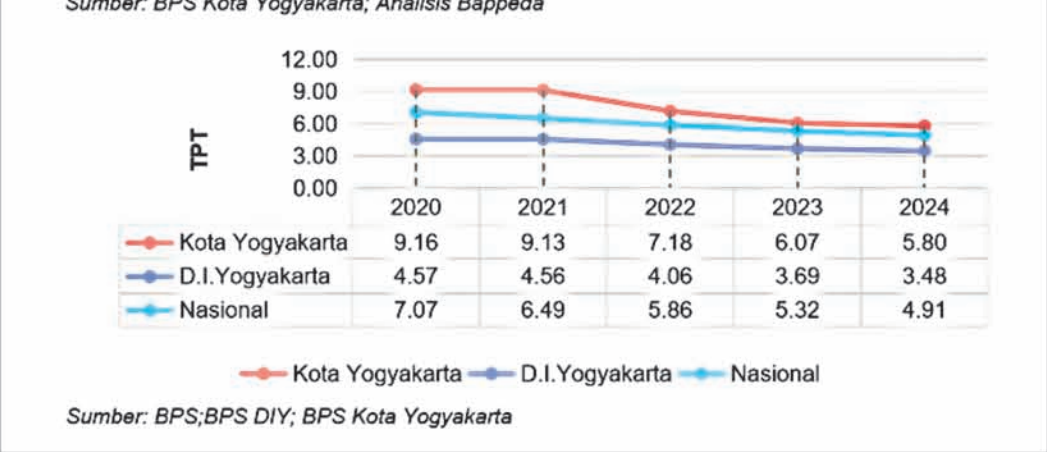
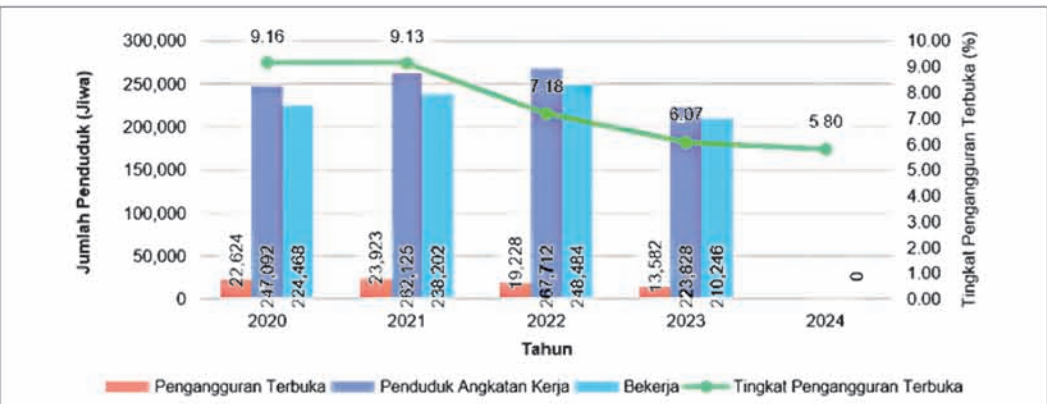
Angka kemiskinan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 sebesar 6,26 persen. Angka ini menunjukkan bahwa di Kota Yogyakarta terdapat 6,26 persen penduduk miskin dari keseluruhan populasi penduduk. Sebagai kemiskinan ini terus menurun dari tahun 2021 yaitu sebesar 7,89 persen dan tahun 2023 sebesar 6,49 persen dengan kenaikan besaran nominal garis kemiskinan tiap tahunnya.

Selama kurun waktu 2021-2024 persentase penduduk miskin Kota Yogyakarta lebih rendah jika dibandingkan dengan DIY dan Nasional. Di tingkat DIY, persentase penduduk miskin Kota Yogyakarta paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten yang lain.



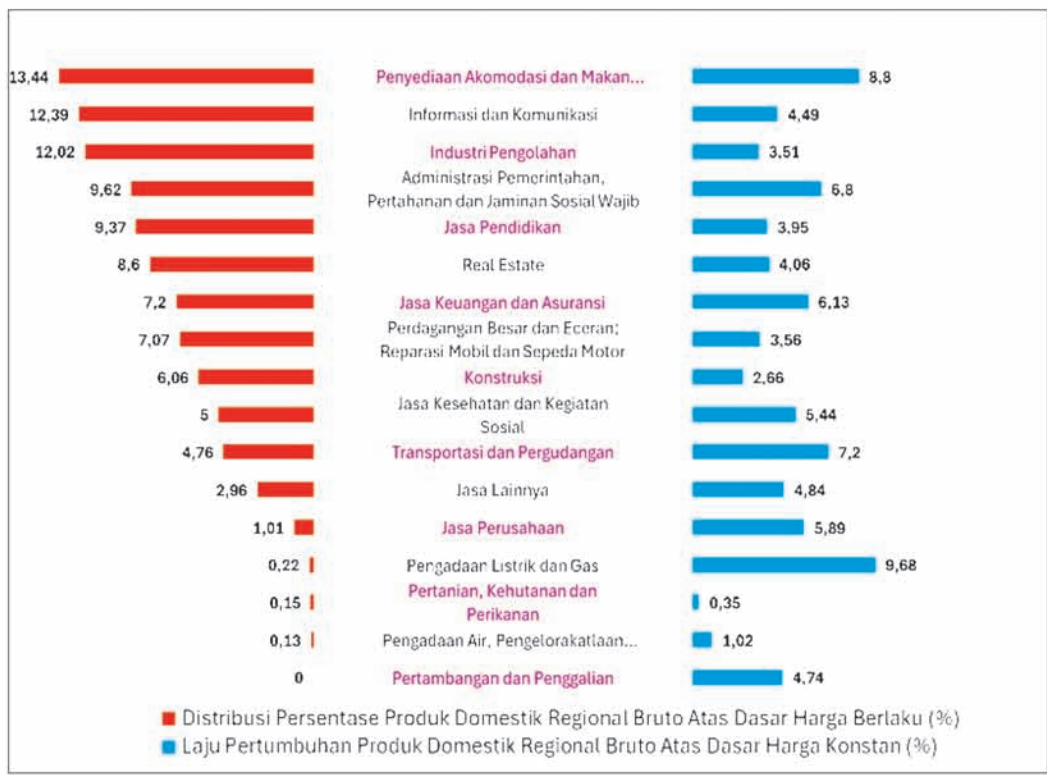
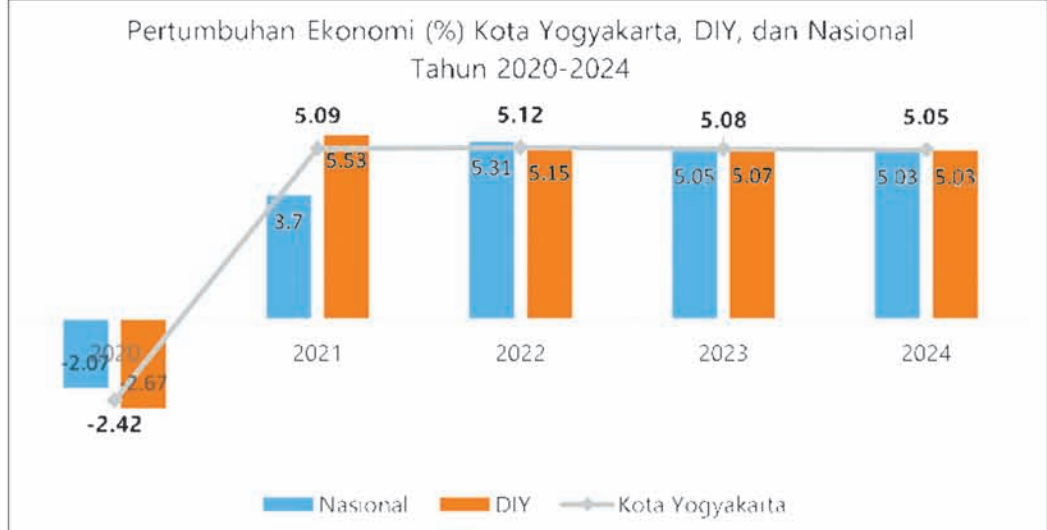
3. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPJ) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam penganggur. TPJ diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPJ digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi indikator ketenagakerjaan dalam pembangunan. Pada tahun 2024, TPJ Kota Yogyakarta adalah sebesar 5,80 persen. Jika dibandingkan dengan TPJ Kota Yogyakarta tahun 2023 sebesar 6,07 persen, TPJ Kota Yogyakarta tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,27. Selanjutnya jika melihat data penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha di Kota Yogyakarta maka sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mampu memberikan kesempatan kerja terbesar dengan menyerap 25,33% dari keseluruhan tenaga kerja di tahun sebelumnya. Kemudian disusul oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 22,42% dan sektor Industri Pengolahan sebesar 12,30%. Hal ini konsisten dengan struktur perekonomian Kota Yogyakarta yang didapog oleh sektor pariwisata yang diprosikan melalui kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,44%, terbesar dari 17 lapangan usaha pembentuk PDRB.



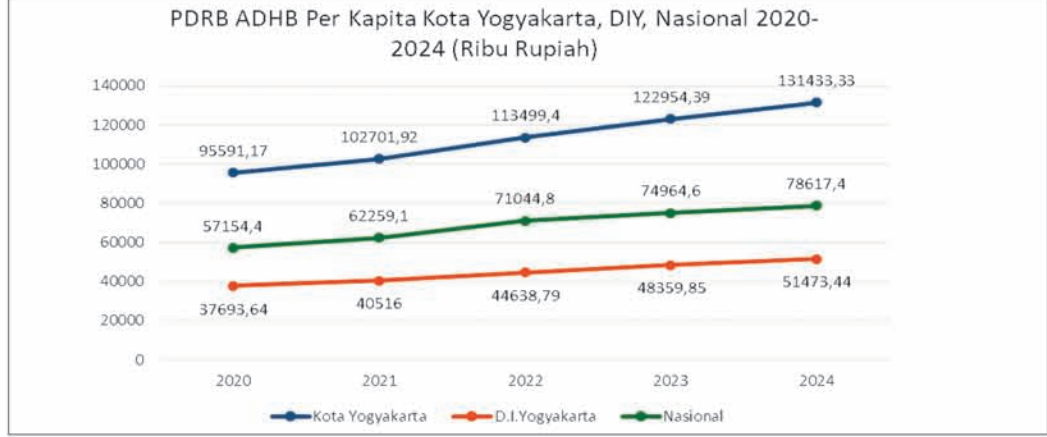
4. Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan daerah terornen dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta kembali termoderasi menjadi 5,05 persen dan tetap konsisten berhasil mempertahankan pertumbuhan di atas 5 persen. Realisasi ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian DIY yang tumbuh sebesar 5,03 persen dan nasional yang juga tumbuh sebesar 5,03 persen. Fenomena turnunya kelas menengah yang berkembang pada perubahan pola konsumsi rumah tangga dan daya beli konsumen pada pertengahan tahun 2024 dianggap menjadi penyebab moderatny pertumbuhan ekonomi sektor akomodasi makan minum yang menjadi sektor unggulan Kota Yogyakarta.



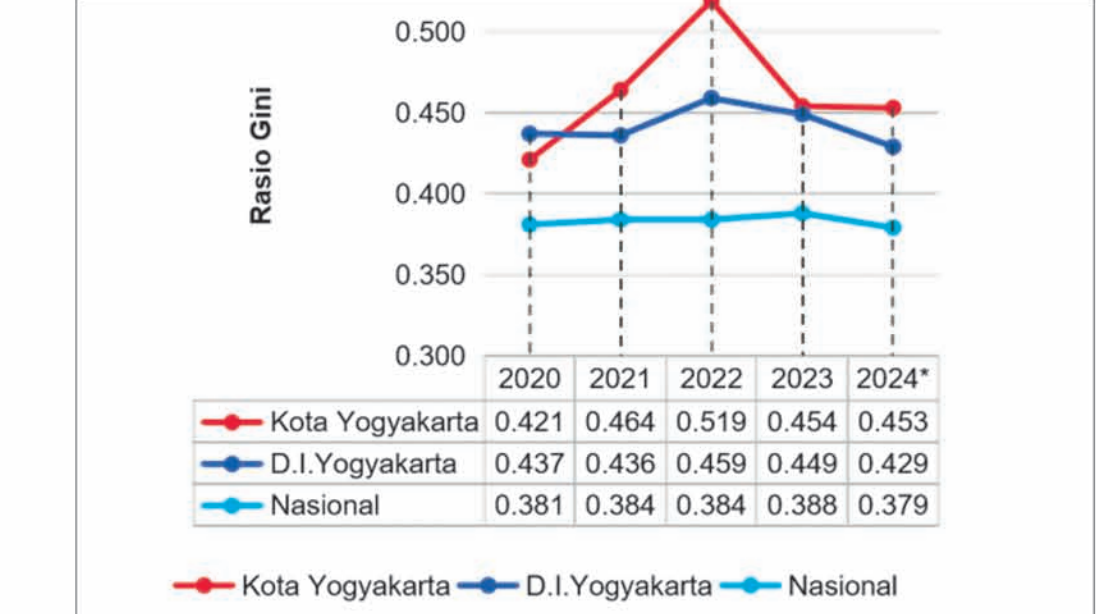
5. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai pendapatan per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Pada tahun 2024 pendapatan per kapita Kota Yogyakarta menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHBR) mengalami peningkatan sebesar 6,89 persen dari tahun sebelumnya atau tercapai dengan nilai Rp131.433,33tahun. Jika dibandingkan dengan nilai provinsi dan nasional, pendapatan per kapita Kota Yogyakarta melebihi besaran pendapatan per kapita provinsi D.I.Yogyakarta dan juga besaran nasional.



6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah Indeks Gini. Indeks Gini Kota Yogyakarta mengalami tren yang cenderung meningkat dari tahun 2022 dengan nilai 0,454. Indeks Gini Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk yang moderat, sedangkan pada tahun 2022 terjadi ketimpangan yang tinggi dan kembali menjadi moderat pada 2023 sampai 2024. Pada tahun 2023 gini ratio Kota Yogyakarta mengalami penurunan di angka 0,453. Selanjutnya di tahun 2024, ratio gini diproyeksikan akan kembali turun dengan nilai proyeksi optimis sebesar 0,389 dan nilai proyeksi pesimis sebesar 0,453. Angka proyeksi gini ri sejalan dengan realisasi ukuran ketimpangan pendapatan lainnya di 2024 seperti indeks thail, indeks-L, dan ukuran bank dunia. Selama setahun terakhir (Maret 2023-Maret 2024), Indeks Thail turun dari 0,193 menjadi 0,159 kemudian indeks-L turun dari 0,147 menjadi 0,144. Untuk ukuran bank dunia, ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta tergolong ketimpangan sedang (moderate inequality) karena porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada di antara 12 persen sampai dengan 17 persen. Selama setahun terakhir, porsi pengeluaran penduduk 40% terendah, meningkat dari 14,63 persen di 2023 menjadi 14,70 persen di 2024. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat deel 1-4 diharapkan mampu memperbaiki ketimpangan yang diukur dengan rasio gini.



*) angka proyeksi sementara

Sumber: BPS; BPS DIY; BPS Kota Yogyakarta

II. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DASAR

a. Urusan Pendidikan

Capaian Kinerja Outcome Urusan Pendidikan, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	90,02%	123,32%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	118,97%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,98%	143,02%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	99,60%

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (2024), <https://elppd.kemendagri.go.id/>

b. Urusan Kesehatan

Capaian Kinerja Outcome Urusan Kesehatan, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit rujukan	4,6%	4,41%
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100%	100%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
12	Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	100%	100%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diri HIV sesuai standar	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan (2024), <https://elppd.kemendagri.go.id/>

c. Urusan Pekerjaan Umum

Capaian Kinerja Outcome Urusan Pekerjaan Umum, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur penguatan pantai di WS Kabupaten/Kota	Bukan kewenangan	Bukan kewenangan
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	100%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga disuluruh Kabupaten/Kota	86,1%	100%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85,17%	97,83%
6	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	75%	100%
7	Tingkat Kematangan Jalan Kabupaten/Kota	97,95%	79,96%
8	Rasio tenaga operator/teknisi analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	44,61%	28,67%
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%

Sumber: Dinas PUPKP (2024), <https://elppd.kemendagri.go.id/>

d. Urusan Perumahan Rakyat

Capaian Kinerja Outcome Urusan Perumahan Rakyat, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Tidak terjadi bencana	Tidak terjadi bencana
2	Facilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi akibat program pemerintah	Tidak terjadi relokasi akibat program pemerintah	Tidak terjadi relokasi akibat program pemerintah
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	24,77%	67,24%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,45%	1,30%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100%	100%

Sumber: Dinas PUPKP (2024), <https://elppd.kemendagri.go.id/>

e. Urusan Transluminimas

Capaian Kinerja Outcome Urusan Transluminimas, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase Gangguan Transluminas yang dapat diselesaikan	100%	100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	93,18%	100%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	100%	100%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran	98,59%	98,59%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9,5 menit	7,5 menit

Sumber: Setkop PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, (BPSD (2024), <https://elppd.kemendagri.go.id/>

f. Bidang Sosial

Capaian Kinerja Outcome Urusan Sosial, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Tingkat persentase penyandang disabilitas tarlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2024), <https://elppd.kemendagri.go.id/>

III. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun 2023 berdasarkan LPDP Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.17-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan Skor 3.2920 dengan Status Kinerja Sedang berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPDP) Tahun 2022. Skor tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,93 dibandingkan dengan skor evaluasi Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPDP) Tahun 2021. Sedangkan untuk hasil EPPD Tahun 2024 atas LPDP Tahun 2023, masih menunggu diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri.

2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Terkait indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD), Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk provinsi DIY. Hal ini merandakan Pemkot Yogyakarta telah mendapatkan predikat opini WTP untuk yang ke-15 kali berturut-turut, dan terbanyak di DIY. Prestasi tersebut diarah selak LKPD Yogyakarta tahun anggaran 2023 diterbitkan oleh Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit kepada Penjabat Wali Kota Yogyakarta. Selain itu Pemkot Yogyakarta juga menjadi Pemerintah Daerah pertama di Indonesia yang menyerahkan unaudited LKPD TA 2023 kepada BPK RI pada 12 Januari 2024.

IV. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Pada tahun anggaran 2024, target pendapatan daerah Kota Yogyakarta sebesar Rp2.012.798.122.693,30 dan terealisasi sebesar Rp2.081.580.284.914,30 atau 103,42% (unaudited) dengan rincian sebagai berikut:



URAIAN	ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.891.891.059.144,00	1.999.249.357.686,53	105,69
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	781.054.844.583,30	855.100.858.914,30	109,48
- Pajak Daerah	532.000.000.000,00	575.887.653.496,00	108,25
- Retribusi Daerah	67.893.391.760,00	76.242.064.340,00	112,30
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	32.309.323.293,30	31.847.065.857,26	98,89
- Lain-lain PAD yang Sah	148.852.126.530,00	171.124.075.221,04	114,96
PENDAPATAN TRANSFER	1.129.983.278.110,00	1.125.143.426.000,00	99,61
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN	937.391.802.000,00	934.903.824.677,00	99,73
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	43.868.080.000,00	52.835.068.000,00	120,44
- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	673.920.861.000,00	673.920.861.000,00	100,00
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	50.147.893.000,00	45.033.949.392,00	89,80
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	169.454.968.000,00	163.113.946.285,00	96,26
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	238.662.302.110,00	53.929.174.000,00	22,60
- Dana Insentif Fisik	238.662.302.110,00	53.929.174.000,00	22,60
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	238.662.302.110,00	236.310.427.323,00	99,01
- Pendapatan Bagi Hasil	152.411.420.730,00	150.610.796.469,00	98,81
- Bantuan Keuangan	86.250.881.380,00	85.699.630.854,00	99,36
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.760.000.000,00	1.336.000.000,00	75,91
- Pendapatan Hibah	1.760.000.000,00	1.336.000.000,00	75,91
- Dana Darurat	-	-	-
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, Tahun 2024

Sedangkan alokasi belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.223.246.284.420,81 terealisasi sebesar Rp2.091.367.191.908,80 atau sebesar 94,07% (unaudited) dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%
BELANJA DAERAH	2.223.246.284.420,81	2.091.367.191.908,80	94,07
BELANJA OPERASI	1.883.190.658.399,00	1.790.533.974.907,80	95,09
- Belanja Pegawai	837.600.827.520,00	785.769.268.630,00	93,81
- Belanja Barang dan Jasa	916.193.565.665,00	877.250.082.536,80	95,75
- Belanja Bunga	-	-	-
- Belanja Subsidi	-	-	-
- Belanja Hibah	104.366.015.194,00	102.778.648.641,00	98,48
- Belanja Bantuan Sosial	25.030.250.000,00	24.735.165.100,00	98,82
BELANJA MODAL	320.045.037.616,00	296.224.425.411,00	92,56
- Belanja Modal Tanah	2.546.302.600,00	1.349.053.990,00	98,59
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.110.091.549,00	107.853.441.626,00	94,52</